

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). Bps.Go.Id.
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/02/05/2379/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2023-tumbuh-5-04-persen--y-on-y-.html>
- Bank Indonesia. (2023). *Kenaikan Harga Barang dan Jasa*. Bi.Go.Id.
<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/inflasi/default.aspx>
- Kementerian Keuangan. (2024). *Terjaga Surplus dan Positif, Waspada perlambatan Penerimaan Negara*. Mediakeuangan.Kemenkeu.Go.Id.
<https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/apbn-kita-april-2024-terjaga-surplus-dan-positif-waspada-pelambatan-penerimaan-negara>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). PMK No. 48/PMK.03/2020 Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perd. PMK No. 48/PMK.03/2020, 7.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/d433363c-14d8-472d-9bc0-3edf04822f16>
- Mekari. (2024a). *Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan Tarif PPN 11 Persen*. Klikpajak.Id. <https://klikpajak.id/blog/pajak-pertambahan-nilai-ppn/>
- Mekari. (2024b). *PPh 21 Terbaru 2024 dan Contoh Perhitungan Tarif*. Klikpajak.Id. [https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pasal-21-2/#:~:text=Pemerintah telah mengatur kembali pemotongan,atau Kegiatan WP Orang Pribadi](https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pasal-21-2/#:~:text=Pemerintah%20telah%20mengatur%20kembali%20pemotongan,atau%20Kegiatan%20WP%20Orang%20Pribadi)
- Mekari. (2024c). *Subjek, Objek, Tarif PPh 26/23 terbaru dan PPh 26 ayat 4*. Klikpajak.Id. <https://klikpajak.id/blog/tarif-pph-23-26-dan-perhitungan/>
- Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Akt., QIA., CFA., C. (2019). *Perpajakan*. Penerbit ANDI.
- jdihkemenkeugoid. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Pribadi*.
- Republik indonesia. (1984). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1984 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN)*.
- Republik indonesia. (2009a). *UU No 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas UU No 8 Tahun 1983 Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*.
- Republik indonesia. (2009b). *UU Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan*

Peraturan Pengganti UU No 5 Tahun 2008 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang Undang.

Republik indonesia. (2014). *MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.*

<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/242~PMK.03~2014Per.HTM>

Republik indonesia. (2021). *UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*

Republik indonesia. (2025). *PER - 32.PJ_.2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26.*

Salin An. (2015). *MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 121/PMK.03/2015 Tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.*
www.jdih.kemenkeu.go.id

